

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

SAGO, DESEMBER 2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT maka atas rahmat-Nya, Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 telah dapat disusun sebagaimana mestinya.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikianlah Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat, semoga bermanfaat. Terima Kasih.

Sago, 31 Desember 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

KEPALA



ERASUKMA MUNAF, ST.MM

Nip. 19720925 199803 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **Daftar Isi**

Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Dinas PUTR **Laporan Realisasi Anggaran** **Neraca** **Catatan atas Laporan Keuangan**

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika Penulisan

- BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target yang telah ditetapkan

- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
 - 4.1 Entitas Pelaporan
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
 - 5.2 Laporan Operasional
 - 5.3 Neraca
 - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

- BAB VI PENUTUP

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 terdiri atas; (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Operasional, (3) Laporan Perubahan Ekuitas, (4) Neraca, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sago, 31 Desember 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

KEPALA



ERASUKMA MUNAF, ST.MM

Nip. 19720925 199803 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2019

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
4.	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	142.000.000,00	160.898.000,00	113,31	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	142.000.000,00	160.898.000,00	113,31	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	142.000.000,00	160.898.000,00	113,31	-
4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	70.000.000,00	52.110.000,00	74,44	-
4.1.2.02.001.	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LRA	70.000.000,00	52.110.000,00	74,44	-
4.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	35.000.000,00	38.388.000,00	109,68	-
4.1.2.10.001.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	35.000.000,00	38.388.000,00	109,68	-
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	37.000.000,00	70.400.000,00	190,27	-
4.1.2.15.001.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	37.000.000,00	70.400.000,00	190,27	-
5.	<u>BELANJA</u>	230.123.802.757,75	151.231.424.324,00	65,72	-
5.1.	BELANJA OPERASI	34.803.194.234,65	31.593.689.934,00	90,78	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	5.038.970.263,00	4.935.098.886,00	97,94	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.688.601.813,00	3.599.579.986,00	97,59	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.822.954.364,00	2.755.683.811,00	97,62	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	291.169.475,00	287.418.340,00	98,71	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	170.796.600,00	170.310.000,00	99,72	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	120.143.800,00	116.090.000,00	96,63	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	164.827.920,00	161.280.020,00	97,85	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.466.767,00	2.359.547,00	95,65	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	46.996,00	40.091,00	85,31	-
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	83.420.022,00	78.248.990,00	93,80	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.071.102,00	5.671.949,00	80,21	-
5.1.1.01.024.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	25.704.767,00	22.477.238,00	87,44	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.343.268.450,00	1.335.518.900,00	99,42	-
5.1.1.02.009.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	1.343.268.450,00	1.335.518.900,00	99,42	-
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	7.100.000,00	-	-	-
5.1.1.06.002.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	3.500.000,00	-	-	-
5.1.1.06.010.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	1.750.000,00	-	-	-
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1.850.000,00	-	-	-
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.764.223.971,65	26.658.591.048,00	89,57	-
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	574.019.050,65	483.092.113,00	84,16	-
5.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	123.048.050,65	105.675.405,00	85,88	-
5.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.254.000,00	4.994.000,00	95,05	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
5.1.2.01.004.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	225.000,00	225.000,00	100,00	-
5.1.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	227.857.000,00	225.457.500,00	98,95	-
5.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	217.635.000,00	146.740.208,00	67,42	-
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	170.515.000,00	170.515.000,00	100,00	-
5.1.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
5.1.2.02.009.	Belanja bahan laboratorium	20.515.000,00	20.515.000,00	100,00	-
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	484.350.000,00	427.232.377,00	88,21	-
5.1.2.03.001.	Belanja telepon	5.200.000,00	2.824.210,00	54,31	-
5.1.2.03.002.	Belanja air	18.000.000,00	3.273.000,00	18,18	-
5.1.2.03.003.	Belanja listrik	240.000.000,00	201.215.167,00	83,84	-
5.1.2.03.012.	Belanja Jasa Kebersihan kantor	200.000.000,00	199.470.000,00	99,74	-
5.1.2.03.016.	Belanja Publikasi	21.150.000,00	20.450.000,00	96,69	-
5.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	64.688.880,00	53.826.080,00	83,21	-
5.1.2.04.001.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	64.688.880,00	53.826.080,00	83,21	-
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.792.681.900,00	1.637.636.153,00	91,35	-
5.1.2.05.001.	Belanja Jasa Service	93.850.000,00	74.691.355,00	79,59	-
5.1.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	756.179.000,00	745.078.981,00	98,53	-
5.1.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	895.005.500,00	791.968.767,00	88,49	-
5.1.2.05.004.	Belanja Jasa KIR	10.000.000,00	1.560.000,00	15,60	-
5.1.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	37.647.400,00	24.337.050,00	64,64	-
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.338.728,00	96.834.954,00	89,38	-
5.1.2.06.001.	Belanja cetak	19.291.677,00	12.149.825,00	62,98	-
5.1.2.06.002.	Belanja Penggandaan	89.047.051,00	84.685.129,00	95,10	-
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.500.000,00	11.160.000,00	97,04	-
5.1.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	11.500.000,00	11.160.000,00	97,04	-
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	108.600.000,00	97.812.000,00	90,07	-
5.1.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	108.600.000,00	97.812.000,00	90,07	-
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	112.715.000,00	94.500.000,00	83,84	-
5.1.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	58.400.000,00	58.400.000,00	100,00	-
5.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	40.565.000,00	27.262.500,00	67,21	-
5.1.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.625.000,00	8.837.500,00	91,82	-
5.1.2.11.007.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.125.000,00	-	-	-
5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	86.215.800,00	86.215.800,00	100,00	-
5.1.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	86.215.800,00	86.215.800,00	100,00	-
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.795.000,00	1.247.706.151,00	89,07	-
5.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	560.695.000,00	473.940.000,00	84,53	-
5.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	187.400.000,00	179.641.835,00	95,86	-
5.1.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	652.700.000,00	594.124.316,00	91,03	-
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	6.058.036.717,00	6.020.061.420,00	99,37	-
5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.350.000,00	8.280.000,00	99,16	-
5.1.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.794.770,00	47.778.170,00	99,97	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
5.1.2.18.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.591.109.990,00	5.554.425.450,00	99,34	-
5.1.2.18.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	410.781.957,00	409.577.800,00	99,71	-
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	782.285.500,00	781.885.500,00	99,95	-
5.1.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	782.285.500,00	781.885.500,00	99,95	-
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.575.838.396,00	11.230.472.500,00	82,72	-
5.1.2.20.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.979.786.944,00	10.423.117.000,00	94,93	-
5.1.2.20.002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.596.051.452,00	807.355.500,00	31,10	-
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.671.000,00	16.919.000,00	86,01	-
5.1.2.23.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	4.671.000,00	4.671.000,00	100,00	-
5.1.2.23.002.	Belanja sosialisasi	15.000.000,00	12.248.000,00	81,65	-
5.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	47.250.000,00	-	-	-
5.1.2.24.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	40.000.000,00	-	-	-
5.1.2.24.002.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.250.000,00	-	-	-
5.1.2.25.	Honorarium PNS	603.400.000,00	491.150.000,00	81,40	-
5.1.2.25.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	467.750.000,00	421.850.000,00	90,19	-
5.1.2.25.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18.300.000,00	9.750.000,00	53,28	-
5.1.2.25.004.	Honorarium Pengawas	13.500.000,00	5.000.000,00	37,04	-
5.1.2.25.005.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	24.450.000,00	11.450.000,00	46,83	-
5.1.2.25.026.	Honorarium Tim DED	79.400.000,00	43.100.000,00	54,28	-
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	3.763.323.000,00	3.711.572.000,00	98,62	-
5.1.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.763.323.000,00	3.711.572.000,00	98,62	-
5.2.	BELANJA MODAL	195.320.608.523,10	119.637.734.390,00	61,25	-
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	760.000.014,00	8.573.000,00	1,13	-
5.2.1.13.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	760.000.014,00	8.573.000,00	1,13	-
5.2.1.13.008.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	760.000.014,00	8.573.000,00	1,13	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.087.113.500,00	1.071.588.900,00	98,57	-
5.2.2.01.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	883.809.500,00	883.809.500,00	100,00	-
5.2.2.01.003.	Belanja modal Pengadaan Excavator	883.809.500,00	883.809.500,00	100,00	-
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	78.250.000,00	63.275.400,00	80,86	-
5.2.2.14.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	78.250.000,00	63.275.400,00	80,86	-
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.424.000,00	22.424.000,00	100,00	-
5.2.2.15.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	22.424.000,00	22.424.000,00	100,00	-
5.2.2.23.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	102.630.000,00	102.080.000,00	99,46	-
5.2.2.23.064.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	102.630.000,00	102.080.000,00	99,46	-
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.350.755.472,50	43.409.207.329,00	38,98	-
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	111.350.755.472,50	43.409.207.329,00	38,98	-
5.2.3.01.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	38.186.655.009,00	34.893.875.912,00	91,38	-
5.2.3.01.006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	63.646.800.305,00	-	-	-
5.2.3.01.030.	Belanj Modal Bangunan Lainnya	9.517.300.158,50	8.515.331.417,00	89,47	-
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.122.739.536,60	75.148.365.161,00	91,51	-

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
5.2.4.01.	Belanja modal Pengadaan Jalan	60.097.030.833,40	55.891.930.266,00	93,00	-
5.2.4.01.003.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/ Kota	59.297.030.833,40	55.097.574.366,00	92,92	-
5.2.4.01.004.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	800.000.000,00	794.355.900,00	99,29	-
5.2.4.02.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	13.570.763.839,70	11.070.635.797,00	81,58	-
5.2.4.02.003.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/ Kota	13.570.763.839,70	11.070.635.797,00	81,58	-
5.2.4.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	9.977.633,50	727.631,00	7,29	-
5.2.4.03.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	9.977.633,50	727.631,00	7,29	-
5.2.4.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	7.278.409.045,00	7.031.404.286,00	96,61	-
5.2.4.08.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	7.278.409.045,00	7.031.404.286,00	96,61	-
5.2.4.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.166.558.185,00	1.153.667.181,00	98,89	-
5.2.4.09.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.166.558.185,00	1.153.667.181,00	98,89	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(229.981.802.757,75)	(151.070.526.324,00)	65,69	

Painan, 31 Desember 2018

Pengguna Anggaran



ERASUKMA MUNAF, ST, MM

NIP. 19720925 199803 1 003

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

LO

No	Uraian	2018
1	KEGIATAN OPERASIONAL	
2	PENDAPATAN	
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
4	Pendapatan Pajak Daerah	-
5	Pendapatan Retribusi Daerah	160.898.000
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
7	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	-
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	160.898.000
9		
10	PENDAPATAN TRANSFER	
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	
12	Dana Bagi Hasil Pajak	-
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-
14	Dana Alokasi Umum	-
15	Dana Alokasi Khusus	-
16	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	-
17		
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	
19	Dana Otonomi Khusus	-
20	Dana penyesuaian	-
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya	-
22		
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-
26	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-
27	Pendapatan Transfer	-
28		
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
30	Pendapatan Hibah	-
31	Pendapatan Dana Darurat	-
32	Pendapatan Lainnya	-
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-
34	JUMLAH PENDAPATAN	160.898.000

35		
36	BEBAN	
37	Beban Pegawai	5.420.775.604
38	Beban Persediaan	606.066.863
39	Beban Jasa	5.378.196.211
40	Beban Pemeliharaan	7.657.697.573
41	Beban Perjalanan Dinas	1.247.706.151
42	Beban Bunga	-
43	Beban Subsidi	-
44	Beban Hibah	3.494.569.774
45	Beban Bantuan Sosial	-
46	Beban Penyusutan dan Penyisihan	-
47	Beban Transfer	-
48	Beban Lain-lain	6.674.000
49	JUMLAH BEBAN	23.811.686.176
50		
51	Surplus/Defisit Dari Operasi	(23.650.788.176)
52		
53	Surplus/Defisit Dari Non Operasional	-
54	Surplus Non Operasional	-
55	Surplus Penjualan Aset Non lancar	-
56	Surplus Penyelesaian Kew. Jk Panjang	-
57	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-
58	Jumlah Surplus Non Operasional	-
59	DEFISIT NON OPERASIONAL	-
60	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	-
61	Defisit Penyelesaian Kew.Jk. Panjang	-
62	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-
63	Jumlah Defisit Non Operasional	-
64	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-
65		
66	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR	
67		
68	POS LUAR BIASA	
69	Pendapatan Luar Biasa	-
70	Beban Luar Biasa	-
71	JUMLAH POS LUAR BIASA	-
72		
73	SURPLUS/ DEFISIT- LO	(23.650.788.176)

Painan, 31 Desember 2018

Kepala,

ERA SUKMA MUNAF, ST, MM

19720925 199803 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NERACA (UNAUDITED)
PER 31 DESEMBER TAHUN 2018 DAN 2017

No.	URAIAN	Ref. CALK	2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2017
1	2	3		4		5
1	ASET					
2	ASET LANCAR					
3	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-	-	-
4	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-	-	-
5	Kas Lainnya		-	-	-	-
6	Piutang Pajak		-	-	-	-
7	Penyisihan Piutang Pajak		-	-	-	-
8	Piutang Pajak Netto		-	-	-	-
9	Piutang Retribusi		-	-	-	-
10	Penyisihan Piutang Retribusi		-	-	-	-
11	Piutang Retribusi Netto		-	-	-	-
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-	-	-
13	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-	-	-
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Netto		-	-	-	-
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah		-	-	-	-
16	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah		-	-	-	-
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah Netto		-	-	-	-
18	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-	-	-
19	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-	-	-
20	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		-	-	-	-
21	Piutang kepada Pihak Ketiga		-	-	-	-
22	Piutang Lainnya		-	-	-	-
23	Penyisihan Piutang		-	-	-	-
24	Beban Dibayar Dimuka		-	-	-	-
25	Persediaan		11.384.948.816,00	13.765.933.606,00	5.240.240.094,00	2.859.255.304,00
26	Aset Lancar Lainnya		-	-	-	-
27	Jumlah Aset Lancar		11.384.948.816,00	13.765.933.606,00	5.240.240.094,00	2.859.255.304,00
28	ASET TETAP					
29	Tanah		117.553.485.495,29	8.573.000,00	8.573.000,00	117.553.485.495,29
30	Peralatan dan Mesin		13.660.189.290,17	1.126.763.813,00	446.351.820,00	12.979.777.297,17
31	Gedung dan Bangunan		101.268.384.985,59	53.678.583.779,33	31.551.165.158,19	79.140.966.364,45
32	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		1.315.965.855.072,13	77.057.080.181,64	389.008.300,36	1.239.297.783.190,85
33	Aset Tetap Lainnya		626.305.881,00	-	-	626.305.881,00
34	Konstruksi dalam Pengerjaan		117.227.502.994,92	27.983.412.270,37	12.618.872.983,58	101.862.963.708,13
35	Akumulasi Penyusutan		-	-	(740.719.004.831,27)	(740.719.004.831,27)
36	Jumlah Aset Tetap (46 s/d 52)		1.666.301.723.719,10	159.854.413.044,34	(695.705.033.569,15)	810.742.277.105,62
37	ASET LAINNYA					
38	Tagihan Piutang Penjualan Anggaran		-	-	-	-
39	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan		-	-	-	-
40	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-	-	-
41	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-	-	-
42	Aset Tidak Berwujud		77.484.621,25	-	-	77.484.621,25
43	Akumulasi Amortisasi		-	-	-	-
44	Aset Non Lancar Lainnya		782.126.049,97	-	-	782.126.049,97
45	Aset Lain-lain		859.610.671,22	-	-	859.610.671,22
46	Jumlah Aset Lainnya		1.678.546.283.206,32	173.620.346.650,34	(690.464.793.475,15)	814.461.143.080,84
47	TOTAL ASET					
48						

No.	URAIAN	Ref. CALK	2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2017
1	2	3		4		5
49	KEWAJIBAN					
50	Kewajiban Jangka Pendek					
51	Utang Perhitungan Pihak Ketiga					
52	Utang Bunga Denda dan <i>Commitment Fee</i>					
53	Pendapatan Diterima Dimuka					
54	Utang pada Pihak Ketiga		38.563.322.440,40	5.252.205.234,30	198.383.829,50	33.509.501.035,60
55	Utang Beban					
56	Utang Jangka Pendek Lainnya		238.500,00	238.500,00	5.473.282,00	5.473.282,00
57	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		38.563.560.940,40	5.252.443.734,30	203.857.111,50	33.514.974.317,60
58	TOTAL KEWAJIBAN		38.563.560.940,40	5.252.443.734,30	203.857.111,50	33.514.974.317,60
59						
60	EKUITAS					
61	Ekuitas		1.639.982.722.265,92	168.367.902.916,04	(690.668.650.586,65)	780.946.168.763,24
62	TOTAL EKUITAS		1.639.982.722.265,92	168.367.902.916,04	(690.668.650.586,65)	780.946.168.763,24
63						
64	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.678.546.283.206,32	173.620.346.650,34	(690.464.793.475,15)	814.461.143.080,84



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CALK	2018	2017
EKUITAS AWAL		780.946.168.763	1.423.868.174.343
SURPLUS/DEFISIT-LO	-	23.650.788.176	- 26.338.290.881
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		882.687.341.679	- 616.583.714.699
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Lain-lain		-	-
Koreksi Ekuitas - Penyusutan		-	-
Koreksi Ekuitas - Piutang		-	-
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang		-	-
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang Dana Bergulir		-	-
Koreksi Ekuitas - Extra Comptable		-	-
Koreksi Ekuitas - Utang		-	-
Koreksi Ekuitas - Amortisasi		-	-
Koreksi Ekuitas - Setara Kas Lainnya		-	-
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara Penerimaan		-	-
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara Pengeluaran		-	-
Koreksi Ekuitas - Lain-lain		-	-
RK		882.687.341.679	-
EKUITAS AKHIR		1.639.982.722.266	780.946.168.763

KEPALA SKPD



ERASUKMA MUNAF, ST., MM

NIP. 19720925 199803 1 003

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (SAP, 2010):

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010). Pelaporan keuangan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan informasi bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- (e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Neraca
- c) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/deficit
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (Pergub 45, 2014). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) Aset Lancar
- b) Aset Tetap
- c) Aset Lainnya
- d) Kewajiban Jangka Pendek
- e) Kewajiban Jangka Panjang
- f) Ekuitas Dana Lancar
- g) Ekuitas Dana Investasi

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, dan neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbadaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

5. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Standar Biaya Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca, yang mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan, informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2018 meliputi hal-hal berikut:

- BABI : Pendahuluan mencakup maksud dan tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika penulisan.
- BAB II : Kebijakan keuangan, ekonomi makro, dan pencapaian target kinerja APBD.

- BAB III : Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD mencakup Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD.
- BAB IV : Kebijakan Akuntansi mencakup entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD, basis akuntansi dan pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan SKPD serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD.
- BAB V : Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan jalan dan jembatan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi, serta urusan operasional kebersihan dan pertamanan, pada tingkat kabupaten sesuai perundang-undangan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten;
- b. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten;
- e. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten;
- f. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan, dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- g. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten;
- h. penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
- i. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- j. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- k. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- l. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- m. penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten.

2.2 Kebijakan keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola APBD tahun anggaran 2018 mengacu kepada kebijakan keuangan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi hal berikut :

- 1) Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah.
- 2) Peningkatan efisien dan efektifitas pengelolaan administrasi dan manajemen belanja daerah.
- 3) Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang berkelanjutan yang memberikan dampak besar sistem pengendalian pengelolaan pendapatan, aset/keuangan daerah.
- 4) Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator yang dipakai dalam pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 adalah menggunakan indikator pencapaian target kinerja yang menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Jasa Konstruksi.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi 3 (Tiga) Seksi sebagai berikut:
 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- d. Bidang Cipta Karya, membawahi 3 (Tiga) Seksi, sebagai berikut:
 - 1. Seksi Perencanaan Keciaptakaryaan;
 - 2. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Tata Ruang dan Kebersihan, membawahi 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut :
 - 1. Seksi Penataan Ruang;
 - 2. Seksi Kebersihan; dan
 - 3. Seksi Pertamanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2018

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5
4.	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	142,000,000.00	160,303,000.00	112.89
4.1.	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</u>	142,000,000.00	160,303,000.00	112.89
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	142,000,000.00	160,303,000.00	112.89
4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	70,000,000.00	52,110,000.00	74.44
4.1.2.02.001.	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LRA	70,000,000.00	52,110,000.00	74.44
4.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	35,000,000.00	37,793,000.00	107.98
4.1.2.10.001.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	35,000,000.00	37,793,000.00	107.98
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	37,000,000.00	70,400,000.00	190.27
4.1.2.15.001.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	37,000,000.00	70,400,000.00	190.27
5.	<u>BELANJA</u>	230,123,802,757.75	151,231,424,324.00	65.72
5.1.	<u>BELANJA OPERASI</u>	34,803,194,234.65	31,593,689,934.00	90.78
5.1.1.	Belanja Pegawai	5,038,970,263.00	4,935,098,886.00	97.94
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3,688,601,813.00	3,599,579,986.00	97.59
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2,822,954,364.00	2,755,683,811.00	97.62
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	291,169,475.00	287,418,340.00	98.71
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	170,796,600.00	170,310,000.00	99.72
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	120,143,800.00	116,090,000.00	96.63

5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	164,827,920.00	161,280,020.00	97.85
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,466,767.00	2,359,547.00	95.65
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	46,996.00	40,091.00	85.31
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	83,420,022.00	78,248,990.00	93.80
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7,071,102.00	5,671,949.00	80.21
5.1.1.01.024.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	25,704,767.00	22,477,238.00	87.44
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1,343,268,450.00	1,335,518,900.00	99.42
5.1.1.02.009.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	1,343,268,450.00	1,335,518,900.00	99.42
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	7,100,000.00	-	-
5.1.1.06.002.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	3,500,000.00	-	-
5.1.1.06.010.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	1,750,000.00	-	-
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1,850,000.00	-	-
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	29,764,223,971.65	26,658,591,048.00	89.57
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	574,019,050.65	483,092,113.00	84.16
5.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	123,048,050.65	105,675,405.00	85.88
5.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5,254,000.00	4,994,000.00	95.05
5.1.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225,000.00	225,000.00	100.00
5.1.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	227,857,000.00	225,457,500.00	98.95
5.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	217,635,000.00	146,740,208.00	67.42
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	170,515,000.00	170,515,000.00	100.00
5.1.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00
5.1.2.02.009.	Belanja bahan laboratorium	20,515,000.00	20,515,000.00	100.00
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	484,350,000.00	427,232,377.00	88.21
5.1.2.03.001.	Belanja telepon	5,200,000.00	2,824,210.00	54.31
5.1.2.03.002.	Belanja air	18,000,000.00	3,273,000.00	18.18
5.1.2.03.003.	Belanja listrik	240,000,000.00	201,215,167.00	83.84
5.1.2.03.012.	Belanja jasa kebersihan kantor	200,000,000.00	199,470,000.00	99.74

5.1.2.03.016.	Belanja Publikasi	21,150,000.00	20,450,000.00	96.69
5.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	64,688,880.00	53,826,080.00	83.21
5.1.2.04.001.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	64,688,880.00	53,826,080.00	83.21
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,792,681,900.00	1,637,636,153.00	91.35
5.1.2.05.001.	Belanja Jasa Service	93,850,000.00	74,691,355.00	79.59
5.1.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	756,179,000.00	745,078,981.00	98.53
5.1.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	895,005,500.00	791,968,767.00	88.49
5.1.2.05.004.	Belanja Jasa KIR	10,000,000.00	1,560,000.00	15.60
5.1.2.05.005.	Belanja Pajak Kendraan Bermotor	37,647,400.00	24,337,050.00	64.64
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	108,338,728.00	96,834,954.00	89.38
5.1.2.06.001.	Belanja cetak	19,291,677.00	12,149,825.00	62.98
5.1.2.06.002.	Belanja Penggandaan	89,047,051.00	84,685,129.00	95.10
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11,500,000.00	11,160,000.00	97.04
5.1.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	11,500,000.00	11,160,000.00	97.04
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	108,600,000.00	97,812,000.00	90.07
5.1.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	108,600,000.00	97,812,000.00	90.07
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	112,715,000.00	94,500,000.00	83.84
5.1.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	58,400,000.00	58,400,000.00	100.00
5.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	40,565,000.00	27,262,500.00	67.21
5.1.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	9,625,000.00	8,837,500.00	91.82
5.1.2.11.007.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4,125,000.00	-	-
5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	86,215,800.00	86,215,800.00	100.00
5.1.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	86,215,800.00	86,215,800.00	100.00
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,400,795,000.00	1,247,706,151.00	89.07
5.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	560,695,000.00	473,940,000.00	84.53
5.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	187,400,000.00	179,641,835.00	95.86
5.1.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	652,700,000.00	594,124,316.00	91.03
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	6,058,036,717.00	6,020,061,420.00	99.37

5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,350,000.00	8,280,000.00	99.16
5.1.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47,794,770.00	47,778,170.00	99.97
5.1.2.18.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5,591,109,990.00	5,554,425,450.00	99.34
5.1.2.18.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	410,781,957.00	409,577,800.00	99.71
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	782,285,500.00	781,885,500.00	99.95
5.1.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	782,285,500.00	781,885,500.00	99.95
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13,575,838,396.00	11,230,472,500.00	82.72
5.1.2.20.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10,979,786,944.00	10,423,117,000.00	94.93
5.1.2.20.002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2,596,051,452.00	807,355,500.00	31.10
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19,671,000.00	16,919,000.00	86.01
5.1.2.23.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	4,671,000.00	4,671,000.00	100.00
5.1.2.23.002.	Belanja sosialisasi	15,000,000.00	12,248,000.00	81.65
5.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	47,250,000.00	-	-
5.1.2.24.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	40,000,000.00	-	-
5.1.2.24.002.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7,250,000.00	-	-
5.1.2.25.	Honorarium PNS	603,400,000.00	491,150,000.00	81.40
5.1.2.25.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	467,750,000.00	421,850,000.00	90.19
5.1.2.25.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18,300,000.00	9,750,000.00	53.28
5.1.2.25.004.	Honorarium Pengawas	13,500,000.00	5,000,000.00	37.04
5.1.2.25.005.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	24,450,000.00	11,450,000.00	46.83
5.1.2.25.026.	Honorarium Tim DED	79,400,000.00	43,100,000.00	54.28
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	3,763,323,000.00	3,711,572,000.00	98.62
5.1.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3,763,323,000.00	3,711,572,000.00	98.62
5.2.	BELANJA MODAL	195,320,608,523.10	119,637,734,390.00	61.25
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	760,000,014.00	8,573,000.00	1.13
5.2.1.13.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	760,000,014.00	8,573,000.00	1.13
5.2.1.13.008.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	760,000,014.00	8,573,000.00	1.13

5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,087,113,500.00	1,071,588,900.00	98.57
5.2.2.01.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	883,809,500.00	883,809,500.00	100.00
5.2.2.01.003.	Belanja modal Pengadaan Excavator	883,809,500.00	883,809,500.00	100.00
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	78,250,000.00	63,275,400.00	80.86
5.2.2.14.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	78,250,000.00	63,275,400.00	80.86
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	22,424,000.00	22,424,000.00	100.00
5.2.2.15.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	22,424,000.00	22,424,000.00	100.00
5.2.2.23.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	102,630,000.00	102,080,000.00	99.46
5.2.2.23.064.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	102,630,000.00	102,080,000.00	99.46
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111,350,755,472.50	43,409,207,329.00	38.98
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	111,350,755,472.50	43,409,207,329.00	38.98
5.2.3.01.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	38,186,655,009.00	34,893,875,912.00	91.38
5.2.3.01.006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	63,646,800,305.00	-	-
5.2.3.01.030.	Belanj Modal Bangunan Lainnya	9,517,300,158.50	8,515,331,417.00	89.47
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	82,122,739,536.60	75,148,365,161.00	91.51
5.2.4.01.	Belanja modal Pengadaan Jalan	60,097,030,833.40	55,891,930,266.00	93.00
5.2.4.01.003.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	59,297,030,833.40	55,097,574,366.00	92.92
5.2.4.01.004.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	800,000,000.00	794,355,900.00	99.29
5.2.4.02.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	13,570,763,839.70	11,070,635,797.00	81.58
5.2.4.02.003.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	13,570,763,839.70	11,070,635,797.00	81.58
5.2.4.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	9,977,633.50	727,631.00	7.29
5.2.4.03.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	9,977,633.50	727,631.00	7.29
5.2.4.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	7,278,409,045.00	7,031,404,286.00	96.61
5.2.4.08.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	7,278,409,045.00	7,031,404,286.00	96.61
5.2.4.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	1,166,558,185.00	1,153,667,181.00	98.89
5.2.4.09.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1,166,558,185.00	1,153,667,181.00	98.89
	SURPLUS/(DEFISIT)	(229,981,802,757.75)	(151,071,121,324.00)	65.69

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 yang menyebabkan rendahnya daya serap realisasi keuangan diantaranya: adanya kegiatan yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan pada satu bidang sehingga proses pelaksanaan kegiatan tidak optimal, adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak optimal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan belanja serta penyajian laporan keuangan.

4.1 Entitas Pelaporan

Sesuai ketentuan yang berlaku, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penata usahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca yang disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan entitas pelaporan dari Laporan Keuangan Daerah, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Hal anggaran disusun berdasarkan *basis kas*, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran data konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang mana manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sama dengan basis pengukuran pada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

4.3.1 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LRA

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

b. Belanja-LRA

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

c. Pendapatan-LO

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pendapatan-LO disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

d. Beban

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian beban menggunakan akuntansi berbasis akrual.

e. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Inventasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Pengukuran/penilaian aset adalah sebagai berikut:

1) Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

2) Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

3) Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebakan pada perolehan persediaan.
- Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

4) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

5) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui

kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

6) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

7) Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai siap dipakai. Biaya perolehan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan pembongkaran bangunan lama.

8) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja,

sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

9) **Kontruksi Dalam Pengerjaan**

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

f. Kewajiban

Dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

g. Ekuitas Dana

Merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

4.3.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada penyusunan laporan keuangan tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu kepada ketentuan tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, kemudian diperkuat dengan dilahirkannya kebijakan akuntansi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Catatan Atas Laporan Keuangan

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Tahun 2017 (Rp)	
5.1.1	Pendapatan	Rp		Rp	
	Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada TA 2018, Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp.142.000.000,00, dan terealisasi sebesar Rp.160.303.000,00 yang terdiri dari:	160.303.000,00		81.645.000,00	
a	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2018 Rp 142.000.000,00	Realisasi 2018 Rp 160.303.000,00	Realisasi 2017 Rp 81.645.000,00	
		Rp 142.000.000,00	Rp 160.303.000,00	Rp 81.645.000,00	

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah. Target Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2018 adalah sebesar Rp.142.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.160.303.000,00, atau 112,89% . Jika dibandingkan dengan TA 2017 yang sebesar Rp.81.645.000 realisasi TA 2018 naik sebesar Rp.78.658.000,00.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Retribusi Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA Rp 70.000.000,00	Rp 52.110.000,00	Rp 52.832.500,00
2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA Rp 35.000.000,00	Rp 37.793.000,00	Rp 19.852.500,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA Rp 37.000.000,00	Rp 70.400.000,00	Rp 8.960.000,00
	Total Rp 142.000.000,00	Rp 160.303.000,00	Rp 81.645.000,00

5.1.2 Belanja

Pada TA 2018 Belanja dianggarkan sebesar Rp.230.123.802.757,75 dan direalisasikan sebesar Rp.151.231.424.324,00 atau sebesar 65,72%. Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,99% dibandingkan penyerapan tahun 2017 yang sebesar 64,73%. Sedangkan untuk realisasi Belanja, bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang terealisasi sebesar Rp.143.543.173.337,00 realisasi TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.7.688.250.987,00 atau 5,3%.

Secara rinci realisasi belanja TA 2018 dan 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2018 dianggarkan sebesar Rp.34.803.194.234,65 dan direalisasikan sebesar Rp.31.593.689.934,00 atau 90,78%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp.33.256.508.108,00 realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.1.662.818.174,00 atau 4,9%. Belanja Operasi terdiri dari:

a Belanja Pegawai Rp 4.935.098.886,00 Rp 4.602.770.992,00
Belanja Pegawai tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.5.038.970.263,00 dan direalisasikan sebesar Rp.4.935.098.886,00 atau 97,94%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp.4.602.770.992,00 realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.332.327.894,00 atau 7,2%.

Jumlah tersebut merupakan realisasi untuk pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2018 dan 2017. Belanja Pegawai 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 3.688.601.813,00	Rp 3.599.579.986,00	Rp 4.115.845.992,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 1.343.268.450,00	Rp 1.335.518.900,00	Rp 486.925.000,00
Total	Rp 5.038.970.263,00	Rp 4.935.098.886,00	Rp 4.602.770.992,00

b Belanja Barang dan Jasa Rp 26.658.591.048,00 Rp 28.653.737.116,00
Belanja Barang dan Jasa tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.29.764.223.971,65 dan direalisasikan sebesar Rp.26.658.591.048,00 atau 89,57%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp.28.653.737.116,00 realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.1.995.146.068,00 atau 6,9%.

	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
Belanja Bahan Pakai Habis	Rp 574.019.050,65	Rp 483.092.113,00	Rp 966.712.828,00
Belanja Bahan/Material	Rp 170.515.000,00	Rp 170.515.000,00	Rp 209.361.000,00
Belanja Jasa Kantor	Rp 484.350.000,00	Rp 427.232.377,00	Rp 3.835.545.011,00
Belanja Premi Asuransi	Rp 64.688.880,00	Rp 53.826.080,00	Rp 41.474.448,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp 1.792.681.900,00	Rp 1.637.636.153,00	Rp 1.345.122.877,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp 108.338.728,00	Rp 96.834.954,00	Rp 104.888.098,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Par kir	Rp 11.500.000,00	Rp 11.160.000,00	Rp 6.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp 108.600.000,00	Rp 97.812.000,00	Rp 96.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	Rp 112.715.000,00	Rp 94.500.000,00	Rp 83.383.000,00
Belanja Pakaian Kerja	Rp 86.215.800,00	Rp 86.215.800,00	Rp 38.998.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1.400.795.000,00	Rp 1.247.706.151,00	Rp 1.420.313.654,00
Belanja Pemeliharaan	Rp 6.058.036.717,00	Rp 6.020.061.420,00	Rp 12.445.446.050,00
Belanja Jasa Konsultansi	Rp 782.285.500,00	Rp 781.885.500,00	Rp 897.562.750,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	Rp 13.575.838.396,00	Rp 11.230.472.500,00	Rp 3.536.342.400,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	Rp 19.671.000,00	Rp 16.919.000,00	Rp 75.000.000,00
Belanja Honorarium Non Pegawai	Rp 47.250.000,00	Rp -	Rp 6.500.000,00
Honorarium PNS	Rp 603.400.000,00	Rp 491.150.000,00	Rp 341.650.000,00
Honorarium Non PNS	Rp 3.763.323.000,00	Rp 3.711.572.000,00	Rp 3.202.337.000,00
Total	Rp 29.764.223.971,65	Rp 26.658.591.048,00	Rp 28.653.737.116,00

2) **Belanja Modal** Rp 119.637.734.390,00 Rp 110.286.665.229,00
 Belanja Modal TA 2018 dianggarkan sebesar Rp.195.320.608.523,10 dan direalisasikan sebesar Rp.119.637.734.390,00 atau 61,25%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp.110.286.665.229,00 realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.9.351.069.161,00 atau 8,4%. Belanja Modal terdiri dari:

	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	Rp 760.000.014,00	Rp 8.573.000,00	-
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	Rp 883.809.500,00	Rp 883.809.500,00	-
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	Rp 78.250.000,00	Rp 63.275.400,00	Rp 351.043.459,00
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	Rp 22.424.000,00	Rp 22.424.000,00	-
Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	Rp 102.630.000,00	Rp 102.080.000,00	Rp 70.675.000,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp 111.350.755.472,50	Rp 43.409.207.329,00	Rp 20.237.389.172,00
Belanja modal Pengadaan Jalan	Rp 60.097.030.833,40	Rp 55.891.930.266,00	Rp 68.935.530.568,00
Belanja modal Pengadaan Jembatan	Rp 13.570.763.839,70	Rp 11.070.635.797,00	Rp 11.581.615.007,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	Rp 9.977.633,50	Rp 727.631,00	Rp 27.233.170,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	Rp 7.278.409.045,00	Rp 7.031.404.286,00	Rp 1.933.409.900,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	Rp 1.166.558.185,00	Rp 1.153.667.181,00	Rp 1.003.682.760,00
Jumlah	Rp 195.320.608.523,10	Rp 119.637.734.390,00	Rp 104.141.579.036,00

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban-LO, dan Surplus/Defisit Operasional.

5.2.1 Pendapatan Laporan Operasional

Pendapatan pada Laporan Operasional di Tahun 2018 adalah sebesar Rp.160.898.000,00. Pada Laporan Realisasi Anggaran nilai Pendapatan adalah sebesar Rp.160.303.000,00, sehingga terdapat perbedaan antara pendapatan pada LO dengan pendapatan pada LRA sebesar Rp.595.000,00. Rincian Pendapatan-LO dan perbedaan saldo dengan Pendapatan LRA dapat diringkas sebagai berikut:

Rincian	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA	Varians
1) Pendapatan Asli Daerah	Rp 160.898.000,00	Rp 160.303.000,00	Rp 595.000,00
Total	Rp 160.898.000,00	Rp 160.303.000,00	Rp 595.000,00

5.2.2 Beban Laporan Operasional

Beban pada Laporan Operasional di Tahun 2018 adalah sebesar Rp.23.811.686.176,00. Pada Laporan Realisasi Anggaran nilai Beban adalah sebesar Rp.31.593.689.934,00 sehingga Beban pada LO lebih rendah dibanding Beban pada LRA sebesar Rp.7.782.003.758,00. Rincian Beban-LO dan perbedaan saldo dengan Beban LRA dapat diringkas sebagai berikut:

Rincian	Beban-LO	Beban-LRA	Varians
1) Beban Pegawai	5.420.775.604,00	5.426.248.886,00	5.473.282,00
2) Beban Persediaan	606.066.863,00	653.607.113,00	47.540.250,00
3) Beban Jasa	5.378.196.211,00	5.377.957.711,00	238.500,00
4) Beban Pemeliharaan	7.657.697.573,00	7.657.697.573,00	-
5) Beban Perjalanan Dinas	1.247.706.151,00	1.247.706.151,00	-
6) Beban Bunga	-	-	-
7) Beban Subsidi	-	-	-
8) Beban Hibah	3.494.569.774,00	11.230.472.500,00	7.735.902.726,00
9) Beban Bantuan Sosial	-	-	-
10) Beban Penyusutan dan Penyisihan	-	-	-
11) Beban Transfer	-	-	-
12) Beban Lain-lain	6.674.000,00	-	6.674.000,00
Total	Rp 23.811.686.176,00	Rp 31.593.689.934,00	Rp 7.782.003.758,00

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2018 dengan nilai Aset sebesar Rp.1.678.546.283.206,32, Kewajiban sebesar Rp.38.563.560.940,40 dan Ekuitas sebesar Rp.1.639.982.722.265,92. Rincian atas masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

5.3.1 ASET

1) **Aset Lancar** Rp.1.678.546.283.206,32 Rp.814.461.143.080,84
 Rp. 11.384.948.816,00 Rp.2.859.255.304,00

Aset lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan.

Pada 31 Desember 2018 Aset Lancar berjumlah Rp.11.384.948.816,00 yang terdiri dari:

a) Kas di Kas Daerah	Rp -	Rp -
b) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -
c) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -	Rp -
d) Kas Lainnya	Rp -	Rp -
e) Piutang Pajak Netto	Rp -	Rp -
f) Piutang Retribusi Netto	Rp -	Rp -
g) Piutang Kepada Pihak Ketiga Netto	Rp -	Rp -
h) Piutang Lainnya Netto	Rp -	Rp -
i) Beban Dibayar Dimuka	Rp -	Rp -
k) Persediaan	Rp 11.384.948.816,00	Rp 2.859.255.304,00
l) Aset Lancar Lainnya	Rp -	Rp -
Jumlah Aset Lancar Per 31 Desember 2018	Rp 11.384.948.816,00	Rp 2.859.255.304,00

Persediaan Rp 11.384.948.816,00 Rp 2.859.255.304,00
 Jumlah tersebut merupakan jumlah Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2018 dan 2017. Persediaan 2017 kurang catat sebesar Rp. 2.137.049.404,00. Hal tersebut terjadi karena per 31 des 2017 terdapat hibah barang yang belum ada berita acara serah terima. Seharusnya saldo per 31 desember 2017 sebesar Rp. 2.859.255.304,00. Persediaan 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	2.859.255.304,00
Mutasi Tambah	Rp	13.765.933.606,00
Mutasi Kurang	Rp	(5.240.240.094,00)
Saldo Akhir	Rp	11.384.948.816,00

Rincian lebih detail Saldo Akhir Persediaan sebesar Rp.11,384,948,816.00 dapat dilihat pada Lampiran Persediaan.

2) **Aset Tetap** Rp 1.666.301.723.719,10 Rp 810.742.277.105,62

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 dan 2017. Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Untuk aset tetap TA 2018, pencatatan dilakukan dengan menggunakan saldo awal sesuai Surat Keputusan Bupati No.900.4/S40/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Saldo Awal Neraca SKPD.

Untuk pengadministrasian Aset Tetap, dilakukan secara terkomputerisasi dengan menggunakan Aplikasi SIPKD-Aset. Aplikasi ini menghasilkan output berupa Kartu Inventaris Barang (KIB), yang menjelaskan nilai aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan rincian setiap aset tetap (meliputi merk, tahun perolehan, spesifikasi, nomor rangka, nomor mesin, dan lain-lain). Namun, untuk penghitungan penyusutan aset tetap setiap tahunnya, digunakan alat bantu Microsoft Office Excel yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis dan jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

(a) Tanah	Rp	117.553.485.495,29
(b) Peralatan dan Mesin	Rp	13.660.189.290,17
(c) Gedung dan Bangunan	Rp	101.268.384.985,59
(d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.315.965.855.072,13
(e) Aset Tetap Lainnya	Rp	626.305.881,00
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	117.227.502.994,92
Jumlah Aset Tetap Sebelum Penyusutan	Rp	1.666.301.723.719,10
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2018	Rp	-
Jumlah Aset Tetap Tahun 2018	Rp	1.666.301.723.719,10

a) **Tanah** Rp 117.553.485.495,29 Rp 117.553.485.495,29

Jumlah tersebut merupakan nilai Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian penambahan dan pengurangan aset tanah tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal	Rp	117.553.485.495,29
Realisasi Belanja Modal (+)	Rp	8.573.000,00
Biaya Penunjang (+)	Rp	-
Mutasi antar SKPD (+)	Rp	-
Reklasifikasi (+)	Rp	-
Hibah (-)	Rp	-
Mutasi antar SKPD (-)	Rp	-
Reklasifikasi (-)	Rp	(8.573.000,00)
Saldo Per 31 Des 2018	Rp	117.553.485.495,29

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah berasal dari pengadaan tanah, baik yang berasal dari rekening belanja modal maupun dari rekening belanja barang/jasa. Pengakuan dan pencatatan Aset Tetap Tanah berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap.

b) **Peralatan dan Mesin** Rp 13.660.189.290,17 Rp 12.979.777.297,17

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal	Rp	12.979.777.297,17
Realisasi Belanja Modal (+)	Rp	1.071.588.900,00
Biaya Penunjang (+)	Rp	-
Hibah/Bantuan Diterima (+)	Rp	-
Mutasi antar SKPD (+)	Rp	55.174.913,00
Reklasifikasi (+)	Rp	-
Hibah/Bantuan diberikan (-)	Rp	-
Mutasi Antar SKPD (-)	Rp	(439.677.820,00)
Reklasifikasi (-)	Rp	-
Extracomptable (-)	Rp	-
Lain-lain (-)	Rp	(6.674.000,00)
Saldo Per 31 Des 2018	Rp	13.660.189.290,17

c) **Gedung dan Bangunan** Rp 101.268.384.985,59 Rp 79.140.966.364,45

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal	Rp	79.140.966.364,45
Realisasi Belanja Modal (+)	Rp	43.409.207.329,00
Biaya Penunjang (+)	Rp	38.400.000,00
Hibah/Bantuan Diterima (+)	Rp	-
Mutasi antar SKPD (+)	Rp	-
Reklasifikasi (+)	Rp	10.230.976.450,33
Hibah/Bantuan diberikan (-)	Rp	(70.304.300,00)
Mutasi Antar SKPD (-)	Rp	(10.318.897.853,64)
Reklasifikasi (-)	Rp	(21.161.963.004,55)
Penghapusan (-)	Rp	-
Saldo Per 31 Des 2018	Rp	101.268.384.985,59

d) **Jalan, Irigasi dan Jaringan** Rp 1.315.965.855.072,13 Rp 1.239.297.783.190,85

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal	Rp	1.239.297.783.190,85
Realisasi Belanja Modal (+)	Rp	75.148.365.161,00
Biaya Penunjang (+)	Rp	121.800.000,00
Hibah/Bantuan Diterima (+)	Rp	-
Mutasi antar SKPD (+)	Rp	-
Reklasifikasi (+)	Rp	1.786.915.020,64
Hibah/Bantuan diberikan (-)	Rp	-
Mutasi Antar SKPD (-)	Rp	-
Reklasifikasi (-)	Rp	(275.265.100,36)
Penghapusan (-)	Rp	-
Lain-lain (-)	Rp	(113.743.200,00)
Saldo Per 31 Des 2018	Rp	1.315.965.855.072,13

e) **Aset Tetap Lainnya** Rp 626.305.881,00 Rp 626.305.881,00
 Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap Lainnya tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal	Rp	626.305.881,00
Realisasi Belanja Modal (+)	Rp	-
Biaya Penunjang (+)	Rp	-
Hibah/Bantuan Diterima (+)	Rp	-
Mutasi antar SKPD (+)	Rp	-
Reklasifikasi (+)	Rp	-
Hibah/Bantuan diberikan (-)	Rp	-
Mutasi Antar SKPD (-)	Rp	-
Reklasifikasi (-)	Rp	-
Lain-lain (-)	Rp	-
Saldo Per 31 Des 2017	Rp	626.305.881,00

f) **Konstruksi Dalam Pengerjaan** Rp 117.227.502.994,92 Rp 101.862.963.708,13
 Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal	Rp	101.862.963.708,13
Mutasi Tambah	Rp	-
Biaya Penunjang (+)	Rp	72.263.600,00
Reklasifikasi (+)	Rp	25.082.249.670,37
Lain-lain	Rp	2.828.899.000,00
Mutasi Kurang (-)	Rp	-
Reklasifikasi (-)	Rp	(12.017.891.470,97)
Lain-lain (-)	Rp	(600.981.512,61)
Saldo Per 31 Des 2018	Rp	117.227.502.994,92

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan secara detail disajikan pada Lampiran Aset Tetap.

g) **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap** Rp - Rp 740.719.004.831,27
 Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang terakumulasi sampai tahun pelaporan. Penghitungan dan pengakuan penyusutan dilakukan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini penyusutan dihitung secara tahunan.

3) **Aset Lainnya** Rp 859.610.671,22 Rp 859.610.671,22
 Merupakan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017. Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan investasi jangka panjang. Aset Lainnya tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	Rp	-	Rp	-
(b) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Rp	-	Rp	-
(c) Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah	Rp	-	Rp	-
(d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	-	Rp	-
(e) Aset Tidak Berwujud	Rp	77.484.621,25	Rp	77.484.621,25
(f) Akumulasi Amortisasi	Rp	-	Rp	-
(g) Aset Lain-lain	Rp	782.126.049,97	Rp	782.126.049,97
(h) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	-	Rp	-
Jumlah	Rp	859.610.671,22	Rp	859.610.671,22

- **Aset Tidak Berwujud** Rp 77.484.621,25 Rp 77.484.621,25
 Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tidak berwujud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2018 dan 2017. Aset Tidak Berwujud 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	77.484.621,25
Mutasi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	77.484.621,25

- **Aset Lain-lain** Rp 782.126.049,97 Rp 782.126.049,97
 Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Lain-lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2018 dan 2017. Aset Lain-lain 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	782.126.049,97
Mutasi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	782.126.049,97

5.3.2 **KEWAJIBAN** Rp 38.563.560.940,40 Rp 33.514.974.317,60
 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi SKPD pada masa yang akan datang. Kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

1) Kewajiban Jangka Pendek	Rp	38.563.560.940,40	Rp	33.514.974.317,60
2) Kewajiban Jangka Panjang	Rp	-	Rp	-
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018	Rp	38.563.560.940,40	Rp	33.514.974.317,60

Kewajiban Jangka Pendek Rp 38.563.560.940,40 Rp 33.514.974.317,60
 Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek mencakup Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (termasuk biaya pinjaman yang jatuh tempo), Utang Belanja, Utang Pajak, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga dengan rincian sebagai berikut:

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp	-	Rp	-
b) Utang Bunga Denda dan Commitment Fee	Rp	-	Rp	-
c) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	-	Rp	-
d) Utang pada Pihak Ketiga	Rp	38.563.322.440,40	Rp	33.509.501.035,60
e) Utang Beban	Rp	-	Rp	-
f) Utang Jangka Pendek lainnya	Rp	238.500,00	Rp	5.473.282,00
Total	Rp	38.563.560.940,40	Rp	33.514.974.317,60

- Utang pada Pihak Ketiga
 Jumlah tersebut merupakan Utang pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017. Pengakuan Utang pada Pihak Ketiga dilakukan berdasarkan perbandingan persentase pembayaran kegiatan dengan persentase penyelesaian fisik kegiatan, serta konfirmasi dari pihak ketiga terkait. Utang tahun 2017 telah dilunasi sebanyak yang terlampir.

	Pekerjaan	Jumlah	Pihak Ketiga
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Carocok Painan	Rp 42.624.750,00	CV. Benteng Karya
2	Gerbang Kawasan Wisata Mandeh	Rp 28.143.935,00	CV. Jaya Confidence
3	Pembangunan Jembatan Gantung Muaro Jambu	Rp 34.281.371,00	CV. Pilar Agung Sejahtera
4	Kantor KAN Tapan	Rp 22.071.904,00	CV. Alyra
5	Pembangunan Play Ground Objek Wisata Pantai Carocok Painan	Rp 71.261.870,00	CV. Benteng Karya
	Total	Rp 198.383.830,00	

Utang Utang Pembuat Jembatan Bukit Kaciak di Koto Luar Tarusan yang dikerjakan oleh CV. Abil Nefila Group telah Terjadi Pemutusan Kontrak. Utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

	Pekerjaan	Jumlah	Pihak Ketiga
1	Relokasi RSUD M.Zein Painan	Rp 33.256.453.168,00	PT. Waskita Karya
2	Pembangunan Jembatan Gantung Muaro Jambu	Rp 133.434.444,00	CV. Pilar Agung Sejahtera
3	Pembangunan Pondasi Jembatan Nyiur Gading Kec. Lengayang	Rp 118.560.213,00	PT. Sultan Arvant Permana
4	Pembangunan Jalan Ambacang Kamba Kenagarian Asam Kamba	Rp 90.750.000,00	CV. Dua Saudara
5	Peningkatan Jalan Sawah Laweh - Gurun Panjang Kecamatan Bayang	Rp 90.800.000,00	CV. Karya Jaya Abadi
6	Peningkatan Jalan Persiapan SMA 3 Kecamatan Sutera Kabupaten	Rp 90.750.000,00	CV. Alyra
7	Pembuatan Jalan Lingkung di Kenagarian Talaok Kecamatan Bayang	Rp 90.800.000,00	CV. Doa Bunda
8	Pembuatan Jalan Lingkung Taluak Kualo Kecamatan Pancung Soal	Rp 137.500.000,00	CV. Zacky Karya
9	Pembangunan Jalan Ruas Kapencong Nagari Kapelgam-Nagari Koto	Rp 152.350.000,00	CV. Nur Tani
10	Pembangunan Jalan Ruas Lubuk Gambir Nagari Kapelgam-Nagari	Rp 176.300.000,00	CV. Palapa Nusa Sarana
11	Pembangunan Jalan Ruas Konag. Barung-Barung Belantai-Kenagarian Sunzai Lundang Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	Rp 105.300.000,00	CV. P A I
12	Peningkatan Jalan Kapujan Kec. Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	Rp 104.900.000,00	CV. Teguh Anugerah Pratama
13	Pembangunan Jalan Siguntur Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	Rp 105.350.000,00	CV. Nur Tani
14	Kelanjutan Jalan Lambung Bukit Gunung Maleio Kecamatan Sutera	Rp 199.800.000,00	CV. Lian Jaya
15	Peningkatan Jalan Lingkung Sungai Sirah Kec. Sutera	Rp 185.100.000,00	CV. Ridho Putra
16	Aspal Lapen Jalan Simpang Coklat Menuju Pale Nag. Koto VIII Pelangai Ranah Pesisir Kab. Pessel	Rp 165.700.000,00	CV. Maronata Pratama
17	Pembukaan/pengerasan Jalan Kurao Sungai Liku menuju Koto Lamo Lakitan Tengah Kec. Ranah Pesisir Kab. Pessel	Rp 138.299.000,00	CV. Bungo Tambang
18	Rabat Beton Jalan Lingkung Taratak Panas Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kab. Pessel	Rp 162.200.000,00	CV. Tecknos Abadi
19	Rehab Jembatan Gantung Sumbu Kenagarian Pelangai Koto Nan Ampek Kecamatan Ranah Pesisir Kab. Pessel	Rp 175.700.000,00	CV. Belva Ashera
20	Aspal Lapen Jalan Ambaan Kenagarian Nyiur Melambai Kecamatan Ranah Pesisir Kab. Pessel	Rp 171.500.000,00	CV. Usaha Ikhlas
21	Rabat Beton Jalan Pulau Siandah Karang Tengah Kenagarian Lakitan Selatan Kec. Lengayang Kab. Pessel	Rp 114.900.000,00	CV. Tecknos Abadi
22	Kelanjutan Pembangunan Jembatan Talao Nag. Taluak Ampalu Indrapura Kecamatan Pancung Soal	Rp 185.250.000,00	CV. Zacky Karya
23	Pemasangan Parit Miring (drainase) Jalan Api-Api Nag. Api-Api di Kenag. Api-Api	Rp 185.650.000,00	CV. Zanire Jaya Teknik
24	Pembangunan Auditorium Kantor Bupati Pesisir Selatan	Rp 1.171.711.868,80	PT. SPECTRATAMA PERKASA
25	Pembangunan Playground di Kawasan Carocok Painan (Lanjutan)	Rp 852.387.900,00	CV. BUDSON
26	Pemasangan Merek Taman Puncak Langkisau	Rp 1.989.250,00	CV. FADIAH KONSTRUKSI
27	Jembatan Bukit Kaciak-Koto Luar Tarusan	Rp 4.817.038,10	CV. Abil Nefila Group
28	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pembangunan RSUD Baru	Rp 49.847.000,00	CV. Bumi Rekaserasi
29	Pengadaan dan Penerangan Merek Welcome To Painan	Rp 7.956.250,00	CV. FADIAH KONSTRUKSI
30	Pembangunan SPAM JP Lunang Dua, Kec. Lunang	Rp 9.766.308,50	CV. RHANIYA
31	Bangunan IPAL Komunal Kawasan Wisata Amping Parak Kec. Sutera	Rp 127.500.000,00	KSM PS-Amping Parak
	Total	Rp 38.563.322.440,40	

- Utang Jangka Pendek lainnya
 Jumlah tersebut merupakan utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017. Pada tahun 2018 utang jangka pendek lainnya terdiri atas tagihan air.

5.3.3 EKUITAS

Rp 1.639.982.722.265,92 Rp 780.946.168.763,24
 Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara menghitung selisih antara aset dengan kewajibannya.
 Nilai Ekuitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2018 berjumlah Rp.1.639,982,722,265,92

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca dan menggambarkan pergerakan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktifitas Operasional pada tahun Pelaporan.

Ekuitas Awal		Rp	780.946.168.763,00	Rp	1.423.868.174.343,00
Jumlah tersebut merupakan ekuitas awal tahun 2018 dan 2017.					
Surplus/Defisit LO		Rp	(23.650.788.176,00)	Rp	(26.338.290.881,00)
Saldo tersebut merupakan Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2017 dan 2016.					
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar		Rp	882.687.341.679,00	Rp	(616.583.714.699,00)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2017 terdiri atas :					
Koreksi Ekuitas - Penyusutan			-		-
Koreksi Ekuitas - Utang			-		-
Koreksi Ekuitas - Setara Kas Lainnya			-		-
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara Penerimaan			-		-
Koreksi Ekuitas - Lain-lain			-		-
RK		Rp	882.687.341.679,00		-
Ekuitas Akhir	Jumlah	Rp	1.639.982.722.266,00	Rp	780.946.168.763,00

Jumlah tersebut merupakan ekuitas akhir 2018 dan 2017. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal dengan surplus/defisit LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, yang diharapkan dapat memperjelas terhadap Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

Sago, 31 Desember 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Jend. Sudirman Sago - Painan Tlp. (0756) 7464130

Daftar Persediaan
per 31 Desember 2018

No	Uraian Persediaan	Nilai Persediaan (Rp)	Keterangan
	Barang Pakai Habis	11.110.000,00	
2	Bahan Bakar Minyak (BBM)	65.509,250	
3	Gedung Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	709.030,500	Belum Ada BAST
4	Pengadilan Negeri Pesisir Selatan	98.325,000	Belum Ada BAST
5	Sambungan Rumah (SR) Sawah Bukik Nagari Koto VIII Pelangai	54.915,053	Belum Ada BAST
6	Sambungan Rumah (SR) Tanjung Raya Nagari Lunang Barat	197.565,053	Belum Ada BAST
7	Sambungan Rumah (SR) Dusun Tuo Nagari Silaut	167.765,053	Belum Ada BAST
8	Sambungan Rumah (SR) Mekar Jaya Nagari Lunang Dua	195.665,053	Belum Ada BAST
9	Sambungan Rumah (SR) Mekar Sari Nagari Lunang Dua	172.765,053	Belum Ada BAST
10	Sambungan Rumah (SR) Talang Sari IV Nagari Lunang Barat	287.797,053	Belum Ada BAST
11	Sambungan Rumah (SR) Sumbu Nagari Kambang	130.865,053	Belum Ada BAST
12	Sambungan Rumah (SR) Mesin Gergaji Nagari Tambang	226.630,053	Belum Ada BAST
13	Sambungan Rumah (SR) Tampunik Nagari Kambang Timur	306.260,053	Belum Ada BAST
14	Sambungan Rumah (SR) Muaro Sakai Nagari Muaro Sakai	186.765,053	Belum Ada BAST
15	Sambungan Rumah (SR) Sawah Bukik Nagari Koto VIII Pelangai	54.915,053	Belum Ada BAST
16	Sambungan Rumah (SR) Tanjung Raya Nagari Lunang Barat	197.565,053	Belum Ada BAST
17	Sambungan Rumah (SR) Dusun Tuo Nagari Silaut	167.765,053	Belum Ada BAST
18	Sambungan Rumah (SR) Mekar Jaya Nagari Lunang Dua	195.665,053	Belum Ada BAST
19	Sambungan Rumah (SR) Mekar Sari Nagari Lunang Dua	172.765,053	Belum Ada BAST
20	Sambungan Rumah (SR) Talang Sari IV Nagari Lunang Barat	287.797,053	Belum Ada BAST
21	Sambungan Rumah (SR) Sumbu Nagari Kambang	130.865,053	Belum Ada BAST
22	Sambungan Rumah (SR) Mesin Gergaji Nagari Tambang	226.630,053	Belum Ada BAST
23	Sambungan Rumah (SR) Tampunik Nagari Kambang Timur	306.260,053	Belum Ada BAST
24	Sambungan Rumah (SR) Muaro Sakai Nagari Muaro Sakai	186.765,053	Belum Ada BAST
25	Bangunan IPAL Komunal	427.319,000	Belum Ada BAST
26	Bangunan IPAL Komunal	427.319,000	Belum Ada BAST
27	Bangunan IPAL Komunal	427.319,000	Belum Ada BAST

28	Bangunan IPAL Komunal	427.319.000	Belum Ada BAST
29	Bangunan IPAL Komunal	852.194.000	Belum Ada BAST
30	Bangunan IPAL Komunal	852.194.000	Belum Ada BAST
31	Bangunan IPAL Komunal	426.097.000	Belum Ada BAST
32	Bangunan IPAL Komunal	426.097.000	Belum Ada BAST
33	Bangunan IPAL Komunal	852.194.000	Belum Ada BAST
34	Bangunan IPAL Komunal	426.097.000	Belum Ada BAST
35	Bangunan IPAL Komunal	426.097.000	Belum Ada BAST
36	Bangunan IPAL Komunal	426.097.000	Belum Ada BAST
37	MCK++	250.646.000	Belum Ada BAST
JUMLAH		11,384,948,816	

Sago, 31 Desember 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



[Handwritten Signature]
ERASUKMA MUNAF, ST., MM
NIP. 19720925 199803 1 003

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
TAHUN 2018

No	Uraian KDP	TAHUN	SALDO 31/12/2017	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 31/12/2018	KETERANGAN
1	Relokasi RSUD. Pajarin	2015	80.219.507.894	-	-	80.219.507.894	
2	Perencanaan Dinding Jalan RS Baru	2015	50.764.500	-	-	50.764.500	Revisi KDP 2017 - Pembangunan
3	Perencanaan Pembangunan Masjid RS baru	2015	28.047.500	-	-	28.047.500	
4	Perencanaan Pembangunan Gerbang Kawasan Pantai Sago	2016	28.749.500	-	28.749.500	-	Fisik CSR BUMN 2017
5	Perencanaan Rumah Gadang Pesisir Selatan	2016	238.393.500	-	-	238.393.500	
6	Pembangunan Auditorium Kantor Bupati Pesisir Selatan	2016	4.026.879.045	18.859.089.340	-	22.885.968.385	Hutang 2018
7	Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Setda	2016	42.603.000	-	-	42.603.000	(2016) Sudah 2 Tahun Tidak Ada Pembangunan Fisik
8	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Dokter Spesialis	2016	46.562.000	-	-	46.562.000	(2016) Sudah 2 Tahun Tidak Ada Pembangunan Fisik
9	Perencanaan Pembangunan Jalan Salido-Carocok	2015	50.274.500	-	-	50.274.500	
10	Perencanaan Pembangunan Jalan Pinggir Pantai Salido	2015	197.660.000	-	-	197.660.000	
11	Perencanaan Peningkatan Jalan Kabupaten	2015	199.035.000	-	199.035.000	-	Pindah ke KIB D - Pemb. Fisik Selesai TA. 2016
12	Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten	2015	145.777.000	-	145.777.000	-	Pindah ke KIB D - Pemb. Fisik Selesai TA. 2016
13	Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Binjai	2015	49.782.000	-	-	49.782.000	
14	Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung SDN 20 Tambang	2015	49.593.500	-	49.593.500	-	Dikerjakan oleh BPBD TA. 2017 (Dana RR)
15	Perencanaan Pembangunan Jembatan Jalan Bkt. Langkisau-Bkt. Putus	2015	229.618.500	-	-	229.618.500	
16	DED Pembangunan Drainase Pasar Sago Sekitarnya	2015	48.158.000	-	-	48.158.000	(2015) Sudah 3 Tahun Tidak Ada Pembangunan Fisik
17	DED Pembangunan Drainase Kp. Baru Sianik	2015	47.452.500	-	-	47.452.500	(2015) Sudah 3 Tahun Tidak Ada Pembangunan Fisik
18	DED Pembangunan Drainase Kota Paiman	2015	47.822.000	-	47.822.000	-	Pindah ke KIB D - Pemb. Fisik Selesai TA. 2016
19	Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jalan Kabupaten (DAK 2016)	2016	212.512.400	-	212.512.400	-	Pindah ke KIB D - Pemb. Fisik Selesai TA. 2016
20	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK 2016)	2016	48.813.000	-	48.813.000	-	Pindah ke KIB D - Pemb. Fisik Selesai TA. 2016
21	Perencanaan Area Take Off Paralayang	2015	15.031.535	-	-	15.031.535	(2015) Sudah 3 Tahun Tidak Ada Pembangunan Fisik
22	Pemotongan Lahan Rest Area Puncak Paku Kawasan Mandeh	2016	243.526.100	-	243.526.100	-	Pekerjaan Pemotongan Lahan Selesai 2017
23	Perencanaan Menara Pandang Kawasan Mandeh	2016	47.848.000	-	-	47.848.000	(2016) Sudah 2 Tahun Tidak Ada Pembangunan Fisik
24	Perencanaan TPST Kawasan Wisata Mandeh	2015	98.852.101	-	-	98.852.101	(2015) Sudah 3 Tahun Tidak Ada Pembangunan Fisik
25	Pembangunan Gerbang Kawasan Wisata Mandeh	2016	645.153.075	-	645.153.075	-	Pekerjaan Fisik Selesai Januari 2018 - Hutang 2017
26	Perencanaan Tugu Kawasan Wisata Bahari Mandeh	2016	48.908.567	-	-	48.908.567	(2016) Sudah 2 Tahun Tidak Ada Pembangunan Fisik
27	Perencanaan Jalan Transportasi Pedesaan DAK 2016	2016	49.515.800	-	49.515.800	-	Pindah ke KIB D - Pemb. Fisik Selesai TA. 2016
28	Review DED Penyusunan Infrastruktur Pemukiman Kumuh Salido	2015	31.439.100	-	-	31.439.100	(2015) Sudah 3 Tahun Tidak Ada Pembangunan Fisik
29	Perencanaan SPAM Nag. Sei Pinang	2016	48.671.000	-	48.671.000	-	Pekerjaan Fisik APBN 2017, 2018 dan 2019
30	Perencanaan SPAM Nag. Sei Nyalo	2016	48.896.000	-	48.896.000	-	Pekerjaan Fisik APBN 2017, 2018 dan 2019
31	Perencanaan SPAM Nag. Mandeh	2016	48.472.000	-	48.472.000	-	Pekerjaan Fisik APBN 2017, 2018 dan 2019
32	Perencanaan Sapras Pertamanan	2016	189.057.500	-	189.057.500	-	Pekerjaan Fisik 2017, 2018 dan 2019 (Playground)
33	Pengawasan Pembangunan Jalan RMP Lunang	2016	10.000.000	-	10.000.000	-	Pindah ke KIB D - Pemb. Fisik Selesai TA. 2016
34	Perencanaan Pembangunan Sapras Daerah Tertinggal (DAK 2015)	2015	48.523.500	-	-	48.523.500	
35	Perencanaan Jalan Transportasi Pedesaan DAK 2015	2015	48.466.500	-	48.466.500	-	Pindah ke KIB D - Pemb. Fisik Selesai TA. 2016
36	Pembuatan UKL/UPL Air Minum DAK	2015	49.729.000	-	-	49.729.000	
37	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan	2016	6.817.388.991	-	6.817.388.991	-	Pindah ke KIB C - Pemb. Fisik Selesai TA. 2017

No	Uraian KDP	TAHUN	SALDO 31/12/2017	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 31/12/2018	KETERANGAN
38	Pembangunan Workshop (Bengkel) Akademi Komunitas	2016	48.960.480	690.119.339	-	739.079.819	Revisi KDP 2017 - Perencanaan
39	Perencanaan Rehab Gedung Kantor Camat Lengayang	2016	49.064.532	-	49.064.532	-	Pindah ke KIB C - Pemb. Fisik Selesai TA. 2018
40	Perencanaan Rehab Gedung Kantor Camat Bayang	2016	49.191.473	-	49.191.473	-	Pindah ke KIB C - Pemb. Fisik Selesai TA. 2018
41	Perencanaan Rehab Gedung Kantor Camat Ranah Pesisir	2016	49.111.355	-	-	49.111.355	
42	Revisi DED Pembangunan SPAM IKK Sako Tapan	2016	46.465.000	-	-	46.465.000	(2016) Sudah 2 Tahun Tidak Ada Pembangunan Fisik
43	Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Lunang	2016	46.518.000	-	-	46.518.000	(2016) Sudah 2 Tahun Tidak Ada Pembangunan Fisik
44	Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Silaut	2016	46.470.000	-	-	46.470.000	(2016) Sudah 2 Tahun Tidak Ada Pembangunan Fisik
45	Perencanaan SPAM IKK Koto Pulai, Lengayang	2016	73.337.401	-	-	73.337.401	(2016) Sudah 2 Tahun Tidak Ada Pembangunan Fisik
46	UKL/UPAL Kec. IV Jurai	2017	47.350.000	-	-	47.350.000	(2016) Sudah 2 Tahun Tidak Ada Pembangunan Fisik
47	Pembangunan Masjid Terapung	2016	520.555.630	557.651.734	-	1.078.207.364	Pekerjaan Fisik TA. 2019 Hibah Australia
48	Perencanaan Rehab Panggung Utama Pantai Carocok	2016	50.555.538	-	50.555.538	-	Pekerjaan Fisik TA. 2017 - Dinas Pariwisata
49	Perencanaan Landmark kawasan Wisata	2016	50.593.046	-	-	50.593.046	(2016) Sudah 2 Tahun Tidak Ada Pembangunan Fisik (Usulan CSR BUMN)
50	Pembangunan Play Ground Carocok Painan	2016	1.154.838.216	-	1.154.838.216	-	Pekerjaan Fisik Selesai Januari 2018 - Hutang 2017
51	Perencanaan dan FGD Tugu Wisata Kecamatan Koto XI Tarusan	2016	48.345.813	-	48.345.813	-	Pindah ke KIB C - Pemb. Fisik Selesai TA. 2018
52	Perencanaan dan FGD Tugu Wisata Kecamatan IV Jurai	2016	48.413.906	-	48.413.906	-	Pindah ke KIB C - Pemb. Fisik Selesai TA. 2018
53	Perencanaan dan FGD Tugu Wisata Kecamatan Lengayang	2016	48.251.531	-	48.251.531	-	Pindah ke KIB C - Pemb. Fisik Selesai TA. 2018
54	Perencanaan dan FGD Tugu Wisata Kecamatan Lunang	2016	48.524.949	-	-	48.524.949	
55	DED Tribun Silaut	2016	49.538.200	-	-	49.538.200	(2016) Sudah 2 Tahun Tidak Ada Pembangunan Fisik
56	Penimbunan Sarana Objek Wisata Carocok Painan	2016	201.204.074	-	201.204.074	-	Pindah ke KIB C - Pemb. Fisik Selesai TA. 2018
57	UKL/UPAL Jalan Pengembangan Kawasan Wisata Mandeh	2017	27.000.000	-	-	27.000.000	
58	Rehab Jembatan Gantung Muaro Jambi	2017	393.005.039	-	393.005.039	-	
59	Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Carocok Painan	2017	666.031.211	-	666.031.211	-	Pekerjaan Fisik Selesai Januari 2018 - Hutang 2017
60	Perencanaan Area Parkir dan PKL kawasan Wisata Carocok Painan	2017	45.896.530	-	45.896.530	-	Pekerjaan Fisik Selesai Januari 2018 - Hutang 2017
61	Perencanaan Alun-alun Kota Painan	2017	147.172.100	-	147.172.100	-	Pindah ke KIB C - Pemb. Fisik Selesai TA. 2018
62	Perencanaan Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah	2017	53.721.107	-	-	53.721.107	Pindah ke KIB C - Pemb. Fisik Selesai TA. 2018
63	Perencanaan Jalan RMP Lunang	2017	50.724.402	-	50.724.402	-	
64	Perencanaan Jalan Kelok Tampuniak - Labuhan Baruak	2017	64.261.243	-	-	64.261.243	
65	Perencanaan Peningkatan Jalan Simp. Bungo Pasang - Salido Kecil	2017	64.287.076	-	64.287.076	-	
66	Perencanaan Jalan Carocok Anau - Mandeh (Jalan Alternatif)	2017	64.268.993	-	-	64.268.993	
67	Perencanaan Jalan Tarusan - Simp. Anau	2017	21.433.331	-	-	21.433.331	
68	Perencanaan Jalan Ampang Pulai - Pulau Karam	2017	21.433.331	-	-	21.433.331	
69	Perencanaan Jalan Pulau Karam - Muaro	2017	21.433.331	-	-	21.433.331	
70	Perencanaan Jalan Sei. Bungin - Labuhan Baruak	2017	64.144.991	-	-	64.144.991	
71	Perencanaan Jalan Koto Berapak - Sikabu Munto	2017	10.000.000	-	-	10.000.000	
72	Perencanaan Jalan Pasar 60 Penggantungan - Sekitarnya	2017	7.500.000	-	-	7.500.000	
73	Perencanaan Jalan Koto Panjang - Ampalu	2017	7.500.000	-	-	7.500.000	
74	Perencanaan Jalan Koto Berapak Bayang	2017	7.500.000	-	-	7.500.000	
75	Perencanaan Jalan Teluk Kasal - Sei. Bungin Kec. Batang Kapas	2017	12.500.000	-	-	12.500.000	
76	Perencanaan Jalan Kumbang I - Kumbang III Kec. Lunang	2017	12.500.000	-	-	12.500.000	
77	Perencanaan Jalan Simp. Lamo - Rawa Gemulau	2017	12.500.000	-	-	12.500.000	
78	Perencanaan Jalan Koto Baru - Berok	2017	7.500.000	-	-	7.500.000	Pekerjaan Fisik TA. 2019

No	Uraian KDP	TAHUN	SALDO 31/12/2017	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 31/12/2018	KETERANGAN
79	Perencanaan Jalan Pasar 60 Tapan - Binjai	2017	7.500.000	-	-	7.500.000	
80	Perencanaan Jembatan Muaro Painan	2017	201.185.791	-	-	201.185.791	
81	Perencanaan Jembatan Gantung Binjai Kec. BAB Tapan	2017	67.166.776	-	-	67.166.776	
82	Perencanaan Jembatan Objek Wisata Koto Barat Sungai Tunu	2017	64.473.626	-	-	64.473.626	
83	Pembangunan Jembatan Nyiur Gading	2017	1.468.217.792	3.554.264.020	-	5.022.481.813	Hutang 2018
84	Jembatan Bukit Kaciak - Koto Luar Tarusan	2017	467.000.204	-	467.000.204	-	Pekerjaan Fisik Selesai Januari 2018 - Hutang 2017
85	UKL/ UPL Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Salak Nag. Jalamu	2017	49.956.599	-	49.956.599	-	Pindah ke KIB D - Pemb. Fisik Selesai TA. 2018
86	Perencanaan Rest Area Batas Padang - Paiman	2017	9.309.963	-	9.309.963	-	Pindah ke KIB C - Pemb. Fisik Selesai TA. 2017
87	Perencanaan Interior DPRD	2017	12.565.349	-	12.565.349	-	Pindah ke KIB C - Pemb. Fisik Selesai TA. 2017
88	Perencanaan Lab IT Kampus Akademi Komunitas Pesisir Selatan	2017	47.284.561	-	-	47.284.561	
89	Perencanaan Penataan Tempat Pedagang Rest Area Batas Padang-	2017	47.984.621	-	-	47.984.621	
90	Perencanaan Rest Area Pasir Putih Kambang	2017	40.810.579	-	-	40.810.579	
91	Perencanaan Cafe Promosi Pangan Carocok Painan - IV Jurai	2017	35.770.354	-	35.770.354	-	Pekerjaan Fisik 2018 - Dinas Pangan
92	Perencanaan Pos Retribusi Kawasan Mandeh - Koto XI Tarusan	2017	42.193.882	-	-	42.193.882	
93	Perencanaan Lapangan Tennis GOR Zaini Zeit - IV Jurai	2017	49.587.613	-	49.587.613	-	Pindah ke KIB C - Pemb. Fisik Selesai TA. 2018
94	Perencanaan Gedung Disdukcapil	2017	49.608.636	-	-	49.608.636	
95	Perencanaan Gedung DLH	2017	49.412.598	-	-	49.412.598	
96	Perencanaan Toilet Kawasan Wisata	2017	49.504.572	-	49.504.572	-	Pindah ke KIB C - Pemb. Fisik Selesai TA. 2018
97	Perencanaan Revisi Gedung Dinas Perikanan	2017	49.430.993	-	-	49.430.993	
98	Perencanaan Gedung Promosi Kuliner dan Pariwisata di Sago	2017	50.165.741	-	-	50.165.741	
99	UKL / UPL Gerbang Kawasan Carocok Painan	2017	46.747.521	-	46.747.521	-	Fisik CSR Bank Syariah Mandiri 2017 dan 2018
100	Pembangunan Ruko Kuliner dan Pujasera di Kawasan Carocok Painan	2018	-	526.423.547	-	526.423.547	Pekerjaan Fisik Lanjutan TA. 2019
101	Perencanaan Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah di Tapan	2018	-	190.880.700	-	190.880.700	Pekerjaan Fisik TA. 2019
102	Perencanaan Pembangunan Relokasi Kantor Camat Pancung Soal	2018	-	100.580.345	-	100.580.345	Pekerjaan Fisik TA. 2019
103	Perencanaan Pembangunan Tugu Rabab Pessel	2018	-	45.463.500	-	45.463.500	Pekerjaan Fisik TA. 2019
104	Perencanaan Pembangunan Tugu Adipura Painan	2018	-	35.600.600	-	35.600.600	Pekerjaan Fisik TA. 2019
105	Perencanaan Pembangunan Toko Kuliner, Aksesoris dan Skywalk	2018	-	100.448.200	-	100.448.200	
106	Penyusunan Pra Rencana Air Mancur di Kawasan Carocok Painan	2018	-	55.705.700	-	55.705.700	
107	Perencanaan Infrastruktur Air Minum Nagari Pulau Rajo Inderapura	2018	-	44.329.333	-	44.329.333	Pekerjaan Fisik TA. 2019
108	Perencanaan Infrastruktur Air Bersih Nagari Siguntur Mudo	2018	-	27.934.267	-	27.934.267	Pekerjaan Fisik TA. 2019
109	Perencanaan Pembangunan Jembatan Siguntur	2018	-	54.057.545	-	54.057.545	
110	Perencanaan Jembatan Rangka Binjai	2018	-	108.376.923	-	108.376.923	
111	Perencanaan Jembatan Wisata Carocok Painan	2018	-	108.382.378	-	108.382.378	
112	Pemasangan Parit Miring (Drainase) Jalan Api-Api Nag. Api-Api di Kenag. Api-Api	2018	-	193.473.300	-	193.473.300	
113	Pembangunan Jalan Ambancang Kamba Kenagarian Asam Kamba Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	2018	-	93.700.000	-	93.700.000	
114	Peningkatan Jalan Sawah Laweh - Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	2018	-	93.300.000	-	93.300.000	
115	Peningkatan Jalan Persiapan SMA 3 Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan	2018	-	94.838.000	-	94.838.000	

No	Uraian KDP	TAHUN	SALDO 31/12/2017	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 31/12/2018	KETERANGAN
116	Pembuatan Jalan Lingkung di Kenagarian Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	2018	-	93.300.000	-	93.300.000	
117	Pembuatan Jalan Lingkung Taluak Kualo Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	2018	-	140.850.000	-	140.850.000	
118	Pembangunan Jalan Ruas Kapencong Nagari Kapelgam-Nagari Koto Berapak Kec. Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	2018	-	156.904.700	-	156.904.700	
119	Pembangunan Jalan Ruas Lubuk Gambir Nagari Kapelgam-Nagari Koto Berapak Kec. Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	2018	-	181.868.100	-	181.868.100	
120	Pembangunan Jalan Ruas Kenag. Barung-Barung Belantai-Kenagarian Sungai Lundang Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	2018	-	109.595.000	-	109.595.000	
121	Peningkatan Jalan Kapujan Kec. Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	2018	-	108.705.000	-	108.705.000	
122	Pembangunan Jalan Siguntur Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	2018	-	109.645.000	-	109.645.000	
123	Kelanjutan Jalan Lambung Bukit Gunung Malelo Kecamatan Sutera	2018	-	207.673.700	-	207.673.700	
124	Peningkatan Jalan Lingkung Sungai Sirah Kec. Sutera	2018	-	192.240.800	-	192.240.800	
125	Aspal Lapen Jalan Simpang Coklat Menuju Pale Nag. Koto VIII Pelangai Ranah Pesisir Kab. Pessel	2018	-	173.211.400	-	173.211.400	
126	Pembukaan/pengerasan Jalan Kurao Sungai Liku menuju Koto Lamo Lakitan Tengah Kec. Ranah Pesisir Kab. Pessel	2018	-	143.219.700	-	143.219.700	
127	Rabat Beton Jalan Lingkung Taratak Panas Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kab. Pessel	2018	-	167.236.700	-	167.236.700	
128	Rehab Jembatan Gantung Sumbu Kenagarian Pelangai Koto Nan Ampek Kecamatan Ranah Pesisir Kab. Pessel	2018	-	175.700.000	-	175.700.000	
129	Aspal Lapen Jalan Ambaan Kenagarian Nyiur Melambai Kecamatan Ranah Pesisir Kab. Pessel	2018	-	177.030.700	-	177.030.700	
130	Rabat Beton Jalan Pulau Siandah Karang Tengah Kenagarian Lakitan Selatan Kec. Lenggayang Kab. Pessel	2018	-	119.912.700	-	119.912.700	
131	Kelanjutan Pembangunan Jembatan Talao Nag. Taluak Ampalu Indrapura Kecamatan Pancung Soal	2018	-	191.700.000	-	191.700.000	
			101.862.963.708	27.983.412.270	12.618.872.984	117.227.502.995	

KDP

SALDO 31/12/2017

MUTASI TAMBAH

MUTASI KURANG

SALDO 31/12/2018

101.862.963.708

27.983.412.270

12.618.872.984

117.227.502.995



Sago, 31 Desember 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

ERASUKMA MUNAF, ST., MM

NIP. 19720925.199803.1.003

